

STRATEGI INTERNALISASI PENDIDIKAN RAGAM MODEL PEMERINTAHAN GEREJA BAGI GENERASI Z

Heru Cahyono¹, Rafles Ngilamele², Tony Suhartono³

¹²³STT Bethel Indonesia Jakarta
herucahyono@sttbi.ac.id

Diterima 15 Juni 2021; direvisi 17 Oktober 2021; diterbitkan 30 November 2021

Abstract

This study explores effective educational strategies to internalize the understanding of church governance systems for Generation Z. Focusing on their unique characteristics, such as digital skills, preference for interactive learning, and values of inclusiveness, this research proposes the integration of technology, active learning methods, contextual relevance, and practical leadership training. Through mobile applications, e-learning platforms, group discussions, simulations, and mentorship programs, Generation Z can acquire the knowledge and skills necessary to participate actively in church leadership. The results indicate that a holistic and integrated approach can equip Generation Z with the insights and abilities needed to manage and lead the church in the future.

Keywords: *Generation Z; church governance; church education; technology; church leadership*

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi strategi pendidikan yang efektif untuk menginternalisasi pemahaman tentang sistem pemerintahan gereja bagi Generasi Z. Dengan fokus pada karakteristik unik mereka, seperti keterampilan digital, preferensi pembelajaran interaktif, dan nilai inklusivitas, penelitian ini mengusulkan integrasi teknologi, metode pembelajaran aktif, relevansi kontekstual, dan pelatihan kepemimpinan praktis. Melalui aplikasi mobile, platform e-learning, diskusi kelompok, simulasi, dan program mentorship, Generasi Z dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berperan aktif dalam kepemimpinan gereja. Hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan yang holistik dan terintegrasi dapat membekali Generasi Z dengan wawasan dan kemampuan yang diperlukan untuk mengelola dan memimpin gereja di masa depan.

Kata Kunci: Generasi Z; pemerintahan gereja; pendidikan gereja; teknologi pembelajaran; kepemimpinan gereja

PENDAHULUAN

Ragam pemerintahan gereja mencakup berbagai bentuk struktur dan sistem pengelolaan yang diterapkan oleh gereja-gereja di seluruh dunia, yang masing-masing memiliki dasar teologis, historis, dan praktis yang unik. Secara umum, terdapat tiga model utama pemerintahan gereja: episkopal, presbiterial, dan kongregasional. Model episkopal, seperti yang diterapkan oleh Gereja Katolik, Anglikan, dan beberapa

denominasi Lutheran, menempatkan otoritas tertinggi pada para uskup yang memiliki wewenang atas beberapa gereja lokal. Model presbiterial, yang digunakan oleh gereja-gereja Reformasi dan Presbyterian, menekankan kepemimpinan oleh para penatua yang dipilih untuk mengelola jemaat dan keputusan diambil melalui majelis jemaat. Sementara itu, model kongregasional, yang dianut oleh gereja-gereja Baptis dan beberapa denominasi Protestan independen, memberikan kekuasaan tertinggi kepada jemaat lokal, di mana setiap anggota memiliki suara dalam pengambilan keputusan gereja. Masing-masing model ini menawarkan pendekatan yang berbeda dalam hal pengambilan keputusan, distribusi kekuasaan, dan keterlibatan jemaat, mencerminkan keberagaman tradisi dan kebutuhan komunitas Kristen di berbagai konteks.

Pada era globalisasi dan digitalisasi saat ini, Generasi Z (Gen Z) yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012 menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang berbeda dari generasi sebelumnya.¹ Gen Z dikenal dengan kemampuan teknologi yang tinggi, akses informasi yang cepat, dan keterbukaan terhadap perubahan sosial dan budaya. Dalam konteks kehidupan beragama, khususnya di gereja, generasi ini juga mengalami dinamika yang unik. Salah satu aspek penting dalam kehidupan gereja adalah pemahaman dan partisipasi dalam model pemerintahan gereja yang beragam, yang mencakup berbagai struktur dan praktik yang diterapkan oleh denominasi-denominasi Kristen.

Internalisasi pendidikan ragam model pemerintahan gereja menjadi sebuah keharusan untuk memastikan bahwa Gen Z memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana gereja dikelola dan bagaimana mereka dapat berkontribusi secara efektif. Pemerintahan gereja yang bervariasi, mulai dari sistem episkopal, presbiterian, hingga kongregasional, menawarkan kerangka kerja yang berbeda dalam pengambilan keputusan, tata kelola, dan kepemimpinan.² Namun, pemahaman tentang model pemerintahan gereja ini sering kali terbatas pada pendidikan formal dan informal yang diberikan di lingkungan gereja. Tantangan utama adalah bagaimana menyusun strategi pendidikan yang efektif dan relevan bagi Gen Z, yang memiliki karakteristik belajar yang berbeda, seperti preferensi terhadap media digital dan pembelajaran interaktif.

¹ Tanu Biswas, "Letting Teach: Gen Z as Socio-Political Educators in an Overheated World," *Frontiers in Political Science* 3, no. April (2021), <https://doi.org/10.3389/fpos.2021.641609>.

² Heru Cahyono, "Sistem Pemerintahan Gereja Bethel Indonesia" (Jakarta: STT Bethel Indonesia, 2011).

Dalam konteks ini, penelitian tentang strategi internalisasi pendidikan ragam model pemerintahan gereja bagi Gen Z menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi metode dan pendekatan yang dapat digunakan untuk menginternalisasi pengetahuan tentang model pemerintahan gereja dalam diri Gen Z, sehingga mereka dapat memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep tersebut dalam kehidupan gereja mereka.

Pendekatan ini diharapkan dapat mencakup penggunaan teknologi digital, media sosial, dan metode pembelajaran interaktif yang sesuai dengan karakteristik belajar Gen Z. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat peran pendidikan formal, non-formal, dan informal dalam gereja, serta bagaimana kolaborasi antara gereja, keluarga, dan lembaga pendidikan dapat mendukung proses internalisasi ini. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek teoretis, tetapi juga pada aplikasi praktis yang dapat diterapkan dalam konteks gereja lokal, dengan tujuan akhir untuk memberdayakan Gen Z agar menjadi pemimpin-pemimpin gereja yang kompeten dan berdedikasi di masa depan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Penelitian ini akan melibatkan wawancara mendalam dengan pemimpin gereja, pendidik Kristen, dan anggota Gen Z yang aktif dalam gereja, serta observasi partisipatif dalam kegiatan pendidikan gereja yang terkait dengan model pemerintahan gereja. Selain itu, analisis dokumen akan dilakukan terhadap kurikulum pendidikan gereja dan materi pengajaran yang digunakan.³ Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema yang relevan dengan strategi internalisasi pendidikan ragam model pemerintahan gereja. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi dalam mengajarkan model pemerintahan gereja kepada Gen Z.

³ Sonny Eli Zaluchu, "Strategi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif di dalam Penelitian Agama," *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 4, no. 1 (2020): 28, <https://doi.org/10.46445/ejti.v4i1.167>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Pemerintahan Gereja

Sistem pemerintahan gereja sebagai sebuah tatanan yang digunakan untuk mengatur gereja untuk mencapai tujuan Tuhan dalam penyelenggaraan gereja.⁴ Sistem pemerintahan gereja mengatur pembagian tugas untuk merencanakan dan mengatur pertumbuhan gereja dan memperjuangkan stabilitas dan kemajuan gereja, serta menjaga ketertiban dan keteraturan dalam gereja.⁵ Mengatur gereja merupakan perintah Allah kepada para pemimpin. Dalam Titus 1:5-9, Paulus memberikan wewenang kepada Titus untuk mengatur hal-hal yang perlu diatur, khususnya dalam membuat struktur pengembalaan di setiap kota dan menunjuk orang-orang dengan kualifikasi tertentu untuk mengisi jabatan pada struktur tersebut (Tit. 1:5-9). Dalam menyusun struktur dalam pemerintahan gereja. Memang Paulus tidak menyebutkan secara kaku bagaimana struktur dalam pemerintahan gereja dibangun, namun dalam keleluasaan tersebut, Paulus berharap agar struktur pemerintahan gereja dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi masing-masing jemaat. Oleh karena itu, aspek penting dalam menyusun pemerintahan gereja adalah kesesuaian dengan kebutuhan zaman. Kesesuaian ini berlaku dalam konteks model, namun prinsipnya harus tetap sama.

Wayne Grudem menjelaskan bahwa terdapat beragam sistem pemerintahan gereja yang penting untuk diketahui, seperti sistem episkopal, presbiterian, dan kongregasional. Memahami berbagai model pemerintahan gereja ini sangat penting bagi Gen Z, karena mereka adalah penerus kepemimpinan gereja di masa depan. Pengetahuan ini akan membekali mereka dengan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana gereja dikelola, serta memberikan dasar yang kuat untuk berpartisipasi aktif dan berkontribusi secara efektif dalam kehidupan gereja. Selain itu, pemahaman tentang berbagai sistem pemerintahan gereja akan membantu Gen Z untuk menghargai keragaman tradisi Kristen dan memfasilitasi dialog yang konstruktif dalam konteks ekumenis.

Pertama, episkopal. Episkopal berasal dari kata Yunani *ἐπίσκοπος* (*episkopos*) yang berarti overseer atau penilik (kata ini juga diterjemahkan menjadi Bishop dan Uskup) dan menyatakan bahwa gereja diatur dan dipimpin oleh para Bishop. Sistem ini

⁴ Heru Cahyono, "Sistem Pemerintahan Gereja Bethel Indonesia", 1.

⁵ Wayne Grudem, *Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine* (Michigan: Zondervan Academic, 2010).

banyak diterapkan pada era pascarasul-rasul. Pada mulanya gereja tidak memiliki pemerintahan yang struktural, namun menghadapi berbagai tantangan seperti, munculnya guru-guru palsu, kebutuhan pelayanan kepada jemaat yang berkembang, hingga perpecahan dalam jemaat sehingga dalam situasi demikian diangkatlah jabatan *episkopos* atau penilik jemaat sebagai perwakilan dari para Rasul dalam kepemimpinan di gereja (Kis. 20:17-28).⁶ Memasuki abad kedua hingga abad kelima, pusat pengajaran dan pengambilan keputusan berfokus pada bapa-bapa gereja yang adalah pemimpin jemaat juga. Bapa gereja dianggap sebagai orang kudus yang mampu mengajar umat sesuai dengan kebenaran Firman. Episkopal yang dianut oleh Gereja Katolik Roma.

Sistem Episkopal yang ada pada gereja Roma Katolik menempatkan pimpinan tertinggi terletak pada seorang Paus. Dalam Yohanes 21, Rasul Petrus dianggap sebagai Paus yang pertama menurut Gereja Roma Katolik dan Paus penggantinya otoritasnya ditransfer secara mistik dari Petrus. Terbentuknya sistem pemerintahan Episkopal ini disebabkan oleh tiga faktor. Pertama, berdasarkan budaya Yunani, terdapat jabatan *Episkopos* yang mempunyai fungsi yang lebih bersifat administratif dan representatif. Kedua, berdasarkan budaya Yahudi, terdapat jabatan *Presbiteros* yang mempunyai fungsi bersifat patriarki dan pengajaran. Ketiga, jabatan *episkopos* berkembang dengan pesat di antara umat Kristen awal karena banyak digunakan oleh jemaat berbahasa dan berbudaya Yunani. Hal ini membuat perkembangannya pesat mengingat pengaruh Helenisme sangat luas. Sedangkan jabatan *presbuteros* hanya digunakan dalam jemaat-jemaat Kristen Yahudi, sehingga tidak heran jabatan Episkopos akhirnya menjadi satu-satunya pemimpin jemaat.⁷ Sistem pemerintahan episkopal mengangkat satu orang tunggal sebagai pemimpin gereja dan diberikan otoritas untuk mengangkat penatua di bawahnya. Sistem pemerintahan dengan kepemimpinan tunggal ini membuat keseragaman doktrin, tata ibadah, dan hal lainnya mudah untuk tercapai. Meskipun demikian, gereja-gereja yang menganut dengan sistem pemerintahan episkopal cenderung menghadapi tantangan untuk mencari sosok pemimpin yang berkharisma

⁶ Hendriko Siagian dan Pardomuan Munthe, "Pengaruh Pengorganisasian Pucuk Pimpinan Gereja terhadap Episkopal," *In Theos: Jurnal Pendidikan Agama dan Teologi* 1, no. 2 (2021): 65–73.

⁷ A.A. Sitompul, "Arti Jabatan dalam Gereja Menurut M. Luther," dalam *Missio Dei: Kumpulan Karangan Kenang-Kenangan Pada Ulang Tahun Ke-60 Dr. A. Lumbantobing*, ed. R.M.G. Marbun and A. Munthe (Pematang Siantar: Kolportase GKPI, 1980).

karena otoritas besar yang dimiliki sang episkopos juga mensyaratkan seseorang yang memiliki kemampuan manajerial yang sangat baik.⁸

Kedua, sistem pemerintahan presbiterian. Presbiterial berasal dari kata *presbiter* yang memiliki arti tua-tua atau penatua. Dengan demikian, sistem presbiterial artinya para tua-tua berjalan bersama. Jalan bersama atau duduk bersama dalam sidang Majelis dan mengambil keputusan. Sistem ini banyak dianut pada periode reformasi gereja abad ke-16. Tokoh-tokoh kunci seperti Marthin Luther, John Calvin, dan Zwingli memainkan peranan dalam konstruksi sistem ini. Situasi yang terjadi di mana pejabat gereja Roma banyak yang hidup dalam kemewahan dan dekat dengan praktik-praktik amoral. Selain itu, munculnya doktrin-doktrin yang tidak Alkitabiah seperti penerbitan surat penghapusan dosa (*indulgensia*), doktrin api penyucian (*purgatori*), dan kanonisasi orang-orang suci yang sudah meninggal membawa keresahan bagi banyak orang terutama rohaniawan.⁹ Keresahan inilah yang mendorong gerakan-gerakan untuk mengembalikan gereja kepada kemurnian yang Alkitab ajarkan dengan cara mempelajari dan memahami Alkitab ke dalam bahasa asli, menelusuri ajaran para bapa gereja, dan menerjemahkannya.¹⁰

Gereja-gereja dengan sistem pemerintahan Presbiterian banyak menjadikan tulisan-tulisan John Calvin sebagai landasan penyusunan prinsip-prinsip pemerintahannya. Terdapat beberapa prinsip-prinsip penting sistem pemerintahan Presbiterian: (i) otoritas pemerintahan gereja lokal (pada sistem pemerintahan Presbiterian pemegang kekuasaan tertinggi berada di tangan penatua sedangkan anggota jemaat memilih para penatua dalam satu periode tertentu yang diatur dalam suatu peraturan gerejawi. Dalam sistem pemerintahan Presbiterian gereja lokal diberikan hak untuk mengatur keuangannya sendiri dan memiliki hak kepemilikan gereja lokal atas gedung dan pastori; (ii) fungsi dan pejabat di gereja. Calvin menyatakan ada empat jabatan gereja, yaitu: pendeta atau gembala, pengajar, penatua, dan diaken. Masing-masing jabatan tersebut memiliki tugas yang spesifik dan dapat dibedakan. Pendeta bertugasewartakan firman dan melayani sakramen yang ditentukan dengan gereja. Penatua bertugas untuk mengawasi kehidupan jemaat, namun tugas ini juga dapat

⁸ Emelda, "Kajian Teologis Mengenai Kepemimpinan Gereja Mula-Mula dalam Kisah Para Rasul," *Jurnal Sains dan Seni ITS* 6, no. 1 (2017): 51–66.

⁹ H. Berkhof and I. H. Enklarr, *Sejarah Gereja* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000).

¹⁰ Jan Sihar Aritonang, *Berbagai Aliran di dalam dan di Sekitar Gereja* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), 24–26.

dikerjakan oleh gembala; (iii) gembala dengan penatua dapat menegur jemaat yang menyimpang dari ajaran dan peraturan gereja; (iv) penatua dapat menegur pendeta yang dianggap melanggar kode etik gereja.

Ketiga, sistem pemerintahan Kongregasional. Salah satu peristiwa penting dan gereja-gereja kongregasional adalah di bawah kepemimpinan Cromwell (1599-1658) berhasil menyusun “Cambridge Platform”, dan “Savoy Declaration of Faith and Order.” Kedua piagam ini berhasil mendorong mereka kepada suatu organisasi yang lebih ketat dan mengikat.¹¹ Sistem pemerintahan kongregasional dapat diidentifikasi ke dalam beberapa ciri, yaitu: (i) otonomi yang diberikan kepada gereja lokal. Pemerintahan gereja kongregasional sangat mengedepankan prinsip bahwa setiap anggota jemaat memiliki hak dan suara yang sama dalam sistem pemerintahan. Demokrasi sangat kental dalam sistem pemerintahan ini sehingga masukan dan suara jemaat lokal adalah otoritas tertinggi, bukan di tangan tokoh atau kelompok tertentu; (ii) otonomi yang dimaksud adalah Setiap jemaat lokal memiliki otonomi yang bersifat mutlak. Posisi anggota jemaat lokal tidak berada di bawah maupun di atas dari jemaat lokal yang lain. Jemaat lokal memiliki kebebasan untuk mengikuti dan mengikatkan diri ke dalam kelompok tertentu. Otonomi jemaat lokal bersifat mutlak sebab penyelenggaraan pada sebuah gereja lokal tidak diatur oleh suatu kelompok atau pihak manapun; (iii) dalam prinsip sistem pemerintahan kongregasional otoritas tunggal hanya terapat pada Kristus sendiri. Kristus yang kemudian menganugerahkan otoritas kepada kongregasi atau kepada anggota-anggota kongregasi secara individu. Pejabat yang telah ditunjuk bertanggung jawab kepada jemaat lokal.¹² Tugas penatua-penatua yang menurut ketetapan Allah dipanggil oleh kongregasi ialah: menggembalakan anggota-anggota kongregasi. Mereka wajib mengemban tugas penggembalaan itu sebagai hamba, dan bukan sebaliknya sebagai tuan. Ciri utama dari sistem pemerintahan kongregasional adalah demokrasi di dalam gereja lokalnya. Hal ini membuat ruang dominasi menjadi lebih kecil lagi dibandingkan dengan pemerintahan Presbiterian. Namun jika semua hal dalam tatanan praktis harus dibicarakan dan disetujui oleh jemaat, maka pelayanan akan cenderung lebih lambat.

¹¹ Sunarto, “Perbandingan Antara Bentuk Presbiterian dan Kongregasional dalam Pemerintahan Jemaat,” *TE DEUM (Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan)* 3, no. 1 (2021): 43–62, <https://doi.org/10.51828/td.v3i1.82>.

¹² Sunarto.

Keempat, tanpa pemerintahan (*liquit*). Penganut sistem ini tidak mendukung bentuk pemerintahan gereja formal. Kelompok ini, seperti Quakers dan Plymouth Brethren, menekankan karya Roh Kudus di dalam diri setiap orang percaya sebagai penuntun utama dalam kehidupan berjemaat. Mereka percaya bahwa setiap individu dapat berhubungan langsung dengan Roh Kudus tanpa perlu adanya struktur pemerintahan gereja yang kaku.¹³ Di dalam kelompok lokal, mungkin terdapat penatua atau penilik yang memiliki tanggung jawab tertentu, tetapi mereka tidak memegang kekuasaan mutlak. Khususnya, kelompok Plymouth Brethren bahkan meniadakan sepenuhnya gereja yang terlihat secara fisik. Bagi mereka, kepemimpinan Roh Kudus merupakan otoritas tertinggi, sehingga mereka merasa tidak perlu membentuk organisasi atau lembaga tertentu dengan pejabat-pejabat resmi.

Walaupun prinsip kelompok ini tidak mendapatkan dukungan eksplisit dari Alkitab, kesadaran mereka untuk tunduk dan menaati kehendak Roh Kudus patut dihargai. Komitmen mereka untuk mengutamakan bimbingan Roh Kudus menunjukkan dedikasi yang mendalam terhadap iman mereka, meskipun pendekatan mereka berbeda dari kebanyakan gereja yang memiliki struktur pemerintahan formal.

Karakteristik Gen Z

Gen Z, yang lahir antara tahun 1997 dan 2012, dikenal sebagai natif digital. Mereka tumbuh dalam lingkungan yang didominasi oleh teknologi dan internet, membuat mereka sangat terampil dalam menggunakan perangkat digital dan media sosial. Akses informasi yang cepat dan luas telah membentuk cara berpikir mereka, mengarahkan mereka untuk menjadi *multitasker* yang efisien dan adaptif terhadap perubahan teknologi. Menurut penelitian oleh Pew Research Center, generasi ini memiliki kecenderungan tinggi untuk menggunakan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan interaksi sosial.¹⁴

Gen Z menunjukkan pendekatan yang berbeda terhadap pendidikan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Mereka lebih menyukai metode pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, dan berbasis teknologi. Video pembelajaran,

¹³ Millard J. Erikson, *Teologi Kristen Volume Tiga* (Malang: Gandum Mas, 2018).

¹⁴ Michael Dimock, "Defining Generations: Where Millennials End and Generation Z Begins," Pew Research Center, 2019, <https://www.pewresearch.org/short-reads/2019/01/17/where-millennials-end-and-generation-z-begins/>.

aplikasi edukasi, dan platform e-learning menjadi alat utama dalam proses belajar mereka. Penelitian oleh Barnes & Noble College Insights menunjukkan bahwa 51% dari Gen Z lebih suka belajar melalui video tutorial dibandingkan dengan buku teks tradisional. Mereka juga cenderung menghargai pembelajaran yang relevan dan langsung dapat diterapkan dalam kehidupan nyata.¹⁵

Keberagaman adalah nilai inti bagi Gen Z. Mereka tumbuh dalam lingkungan yang lebih beragam secara etnis, budaya, dan sosial daripada generasi sebelumnya. Hal ini membuat mereka sangat inklusif dan terbuka terhadap perbedaan. Gen Z cenderung mendukung gerakan sosial yang berfokus pada kesetaraan dan keadilan, serta lebih mungkin untuk menentang diskriminasi dalam bentuk apa pun. Gen Z memiliki pandangan yang sangat progresif tentang isu-isu sosial dan sangat menghargai keberagaman. Gen Z juga dikenal memiliki kesadaran tinggi terhadap isu-isu lingkungan. Mereka khawatir tentang perubahan iklim dan dampak lingkungan dari aktivitas manusia, dan banyak dari mereka yang terlibat dalam aksi dan gerakan untuk lingkungan. Perubahan iklim adalah salah satu kekhawatiran terbesar bagi Gen Z di seluruh dunia. Mereka cenderung mendukung praktik-praktik berkelanjutan dan memilih produk yang ramah lingkungan.¹⁶

Kesadaran akan kesehatan mental menjadi salah satu karakteristik menonjol dari Gen Z. Mereka lebih terbuka dalam membicarakan isu-isu kesehatan mental dan mencari bantuan ketika diperlukan. Menurut laporan oleh American Psychological Association, tingkat stres dan kecemasan di kalangan Gen Z lebih tinggi dibandingkan dengan generasi sebelumnya, tetapi mereka juga lebih proaktif dalam mencari solusi melalui terapi dan dukungan sosial. Kesadaran ini mendorong mereka untuk mencari keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan.

Gen Z cenderung memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi. Banyak dari mereka yang bercita-cita untuk memulai usaha sendiri atau terlibat dalam bisnis startup. Mereka menghargai kemandirian dan lebih memilih karier yang menawarkan fleksibilitas serta kesempatan untuk mengekspresikan kreativitas mereka. Menurut laporan oleh Global Entrepreneurship Monitor, Gen Z menunjukkan minat yang signifikan terhadap

¹⁵ Barnes & Noble College, "Getting to Know: Exploring Middle And High Schoolers' Expectations For Higher Education," 2018.

¹⁶ Tracy Francis and Fernanda Hoefel, "'True Gen': Generation Z and Its Implications for Companies," *McKinsey & Company*, 2018.

kewirausahaan, dengan banyak yang sudah memulai bisnis kecil-kecilan bahkan sebelum lulus dari sekolah. Kemandirian ini diperkuat oleh kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi untuk menciptakan peluang bisnis baru.

Strategi Internalisasi Sistem Pemerintahan Gereja bagi Karakteristik Gen Z

Integrasi Teknologi dalam Pembelajaran

Menggunakan teknologi sebagai alat utama dalam proses pembelajaran adalah salah satu strategi yang sangat efektif untuk Gen Z. Pembuatan aplikasi mobile khusus yang berisi modul-modul pembelajaran tentang berbagai sistem pemerintahan gereja, seperti episkopal, presbiterian, dan kongregasional, dapat menjadi solusi yang inovatif. Modul-modul ini bisa mencakup video tutorial yang menjelaskan sejarah dan fungsi setiap sistem pemerintahan gereja, kuis interaktif untuk menguji pemahaman, serta forum diskusi online yang memungkinkan para peserta belajar secara mandiri sekaligus berkolaborasi dengan rekan-rekan mereka. Misalnya, sebuah aplikasi bernama "Church Governance 101" dapat menyediakan konten multimedia yang menarik, seperti animasi yang menggambarkan struktur hierarki dalam sistem episkopal atau simulasi interaktif yang menampilkan proses pengambilan keputusan dalam sistem presbiterian.¹⁷

Penggunaan platform *e-learning* seperti *Moodle* atau *Google Classroom* juga dapat diterapkan untuk mengelola konten pendidikan dan memantau kemajuan belajar. *Moodle*, misalnya, memungkinkan instruktur untuk mengunggah materi pelajaran, membuat kuis dan tugas, serta menyediakan forum diskusi bagi siswa. *Google Classroom*, di sisi lain, menawarkan integrasi dengan berbagai alat Google seperti *Google Docs* dan *Google Meet*, yang mempermudah kolaborasi dan komunikasi.¹⁸ Dengan menggunakan teknologi ini, gereja dapat menciptakan lingkungan belajar yang fleksibel dan mendukung kebutuhan unik Gen Z, seperti yang ditunjukkan dalam penelitian oleh Pew Research Center yang mengungkapkan bahwa generasi ini memiliki kecenderungan tinggi untuk menggunakan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk pendidikan.

¹⁷ Governance Matters, "The Relationship Model of Governance 101 for Christian Churches," Governance Matters, 2021, <https://governancematters.com/product/the-relationship-model-of-governance-101-for-christian-churches/>.

¹⁸ Priskila Issak Benyamin, Ucok P Sinaga, dan Febie Yolla Gracia, "Penggunaan 'Platform' Digital pada Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen di Era Disrupsi," *REGULA FIDEI: Jurnal Pendidikan Agama Kristen* 6, no. 1 (2021): 60–68.

Metode Pembelajaran Aktif dan Kolaboratif

Gen Z lebih menyukai metode pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif, sehingga strategi pendidikan harus mencakup kegiatan yang mendorong partisipasi aktif. Salah satu cara efektif adalah melalui diskusi kelompok yang berfokus pada studi kasus nyata dari sejarah gereja. Misalnya, sebuah diskusi kelompok dapat membahas kasus Reformasi Protestan dan bagaimana sistem pemerintahan gereja presbiterian terbentuk sebagai respons terhadap penyalahgunaan otoritas dalam gereja Katolik Roma. Peserta bisa mengeksplorasi peran tokoh-tokoh seperti Martin Luther dan John Calvin dalam mengadvokasi sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan berpusat pada penatua, serta tantangan yang mereka hadapi dalam proses tersebut.¹⁹

Selain diskusi, simulasi dan *role-playing* juga merupakan metode efektif untuk membantu Gen Z memahami secara praktis bagaimana setiap sistem pemerintahan gereja berfungsi. Dalam simulasi, peserta bisa diberi peran sebagai uskup, penatua, atau anggota kongregasi. Contohnya, mereka dapat mensimulasikan sidang majelis dalam sistem presbiterian di mana penatua harus membuat keputusan tentang pengelolaan keuangan gereja atau menangani konflik jemaat. Melalui simulasi ini, peserta dapat belajar tentang dinamika kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam konteks gereja secara langsung. Pendekatan ini tidak hanya membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang struktur dan fungsi pemerintahan gereja.

Pengajaran Kontekstual dan Relevan

Materi pembelajaran harus dirancang agar relevan dengan kehidupan sehari-hari Gen Z dan kontekstual dengan situasi gereja masa kini. Pengajaran tentang sistem pemerintahan gereja harus dikaitkan dengan isu-isu kontemporer yang mereka hadapi, seperti kepemimpinan dalam era digital, respons gereja terhadap perubahan sosial, dan integrasi nilai-nilai Kristen dalam dunia kerja dan kewirausahaan. Misalnya, modul pembelajaran dapat mencakup studi kasus tentang bagaimana gereja menggunakan media sosial untuk meningkatkan partisipasi jemaat dan menyebarkan pesan Injil, atau bagaimana gereja-gereja di berbagai belahan dunia merespons tantangan seperti

¹⁹ Donald K. McKim, *Presbyterian Questions, Presbyterian Answers: Exploring Christian Faith* (Louisville: Westminster John Knox Press, 2004).

perubahan iklim dan ketidakadilan sosial. Dengan menghadirkan contoh-contoh nyata dari kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan prinsip-prinsip pemerintahan gereja, Gen Z akan lebih termotivasi untuk memahami dan menginternalisasi konsep-konsep tersebut.

Sebagai contoh konkret, sebuah gereja bisa mengadakan workshop tentang "Digital Leadership in the Church," di mana para peserta belajar tentang penggunaan teknologi dalam kepemimpinan gereja dan bagaimana memanfaatkan platform digital untuk mencapai jemaat yang lebih luas. Selain itu, program *mentorship* yang menghubungkan pengusaha Kristen sukses dengan anggota muda jemaat bisa membantu Gen Z melihat bagaimana nilai-nilai Kristen dapat diterapkan dalam dunia bisnis dan kewirausahaan. Penelitian oleh Barna Group menunjukkan bahwa Gen Z sangat dipengaruhi oleh isu-isu sosial dan lingkungan, sehingga materi pembelajaran yang mengaitkan sistem pemerintahan gereja dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan juga akan sangat relevan dan menarik bagi mereka.²⁰ Dengan cara ini, pendidikan gereja tidak hanya menjadi relevan tetapi juga memberi dampak langsung pada kehidupan dan aspirasi Gen Z.

Penekanan pada Nilai-Nilai Inklusivitas dan Keberagaman

Menghargai keberagaman dan inklusivitas adalah nilai inti bagi Gen Z. Oleh karena itu, strategi pendidikan gereja harus mencakup diskusi tentang bagaimana berbagai model pemerintahan gereja menghormati dan mencerminkan nilai-nilai ini. Seminar atau *workshop* tentang keberagaman dalam struktur gereja di berbagai denominasi Kristen di seluruh dunia bisa membantu memperluas wawasan mereka. Misalnya, membahas bagaimana sistem episkopal di Gereja Katolik Roma, sistem presbiterian di Gereja Reformed, dan sistem kongregasional di banyak gereja Protestan independen masing-masing menghadirkan cara yang berbeda dalam mengatur dan memimpin jemaat. Mengundang pemimpin gereja dari latar belakang budaya dan tradisi yang berbeda untuk berbicara juga bisa memberikan perspektif yang lebih kaya, memungkinkan Gen Z melihat bagaimana nilai-nilai keberagaman dan inklusivitas diterapkan dalam konteks yang berbeda.

²⁰ Barna Group, *Gen Z: The Culture, Beliefs and Motivations Shaping the Next Generation (English and Spanish Edition)* (London: Barna Group, 2018).

Pentingnya menghargai perbedaan sistem gereja yang ada terletak pada kemampuan Gen Z untuk belajar dari kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem, serta mengintegrasikan praktik terbaik ke dalam pemerintahan gereja lokal mereka sendiri. Dengan memahami berbagai model pemerintahan gereja, Gen Z akan lebih mampu menerima dan menghargai perbedaan sambil tetap memberikan koreksi yang konstruktif bagi sistem pemerintahan gereja mereka sendiri. Misalnya, mereka bisa mengadopsi praktik transparansi dan akuntabilitas dari sistem presbiterian, atau semangat partisipasi jemaat dari sistem kongregasional. Dengan cara ini, mereka tidak hanya memperkuat struktur pemerintahan gereja lokal tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai inklusivitas dan keberagaman terus diterapkan dan dihormati dalam komunitas gereja mereka.

Pelatihan dan Pengembangan Kepemimpinan

Melatih Gen Z dalam keterampilan kepemimpinan yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai sistem pemerintahan gereja adalah strategi kunci lainnya. Program pelatihan ini harus mencakup komponen-komponen seperti manajemen konflik, pengambilan keputusan, komunikasi efektif, dan kepemimpinan pelayan (*servant leadership*).²¹ Misalnya, dalam pelatihan manajemen konflik, peserta dapat diberikan studi kasus tentang perselisihan di antara anggota jemaat dan diajarkan bagaimana menyelesaikannya dengan cara yang bijaksana dan alkitabiah. Dalam pelatihan komunikasi efektif, mereka dapat berlatih menyampaikan pesan yang jelas dan meyakinkan di depan publik atau dalam rapat gereja. Mengadakan workshop intensif dan seminar yang difasilitasi oleh pemimpin gereja berpengalaman dapat memberikan wawasan praktis dan teori yang diperlukan untuk mengembangkan keterampilan ini.

Dengan melibatkan Gen Z dalam proyek-proyek gereja yang nyata, mereka bisa mendapatkan pengalaman praktis yang mendalam dan memahami secara langsung tantangan serta tanggung jawab dalam kepemimpinan gereja. Misalnya, mereka bisa dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan acara besar gereja, seperti *retreat* atau kegiatan amal, yang memerlukan koordinasi, delegasi tugas, dan evaluasi hasil. Selain itu, program *mentorship* di mana pemimpin gereja senior membimbing generasi muda

²¹ Dirk Van Dierendonck, "Servant Leadership: A Review and Synthesis," *Journal of Management* 37, no. 4 (2011): 1228–61.

dapat memperkaya proses pembelajaran mereka. Menurut sebuah studi oleh Barna Group, *mentorship* efektif sangat penting dalam membentuk pemimpin muda yang kuat dan berkomitmen, karena mereka mendapat kesempatan untuk belajar langsung dari pengalaman dan kebijaksanaan para pemimpin yang lebih senior. Dengan demikian, Gen Z tidak hanya memperoleh keterampilan teoritis tetapi juga pengalaman praktis yang sangat berharga dalam konteks kehidupan gereja nyata.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, gereja dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan relevan bagi Gen Z, membantu mereka untuk memahami, menginternalisasi, dan menerapkan berbagai sistem pemerintahan gereja dengan baik. Hal ini tidak hanya akan membekali mereka dengan pengetahuan yang mendalam tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin gereja yang responsif dan adaptif di masa depan.

SIMPULAN

Dengan memahami karakteristik unik Generasi Z dan mengintegrasikannya dalam strategi pendidikan gereja, kita dapat menciptakan pendekatan yang efektif untuk menginternalisasi pemahaman tentang berbagai sistem pemerintahan gereja. Melalui penggunaan teknologi, metode pembelajaran yang interaktif, relevansi materi pengajaran, penekanan pada nilai inklusivitas, serta pelatihan kepemimpinan yang berfokus pada praktik nyata, Generasi Z dapat dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk berperan aktif dalam kepemimpinan gereja. Ini akan membantu mereka tidak hanya memahami struktur dan fungsi pemerintahan gereja tetapi juga menerapkan prinsip-prinsip ini dalam konteks gereja lokal mereka.

Secara keseluruhan, upaya untuk mendidik dan melibatkan Generasi Z dalam pemerintahan gereja memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Dengan fokus pada relevansi, inklusivitas, dan pengembangan keterampilan praktis, gereja dapat memastikan bahwa Generasi Z siap untuk mengambil alih kepemimpinan di masa depan. Penerapan strategi-strategi ini tidak hanya akan memperkuat komunitas gereja saat ini tetapi juga memastikan kesinambungan dan stabilitas kepemimpinan gereja di masa mendatang, membekali generasi penerus dengan wawasan yang mendalam dan kemampuan adaptasi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, Jan Sihar. *Berbagai Aliran di dalam dan di Sekitar Gereja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016.
- Barna Group. *Gen Z: The Culture, Beliefs and Motivations Shaping the Next Generation (English and Spanish Edition)*. London: Barna Group, 2018.
- Barners & Noble College. "Getting to Know: Exploring Middle And High Schoolers' Expectations For Higher Education," 2018.
- Benyamin, Priskila Issak, Ucok P Sinaga, dan Febie Yolla Gracia. "Penggunaan 'Platform' Digital pada Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen di Era Disrupsi." *REGULA FIDEI: Jurnal Pendidikan Agama Kristen* 6, no. 1 (2021): 60–68.
- Berkhof, H., and I. H. Enklarr. *Sejarah Gereja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000.
- Biswas, Tanu. "Letting Teach: Gen Z as Socio-Political Educators in an Overheated World." *Frontiers in Political Science* 3, no. April (2021).
<https://doi.org/10.3389/fpos.2021.641609>.
- Cahyono, Heru. "Sistem Pemerintahan Gereja Bethel Indonesia." Jakarta: STT Bethel Indonesia, 2011.
- Dierendonck, Dirk Van. "Servant Leadership: A Review and Synthesis." *Journal of Management* 37, no. 4 (2011): 1228–61.
- Dimock, Michael. "Defining Generations: Where Millennials End and Generation Z Begins." Pew Research Center, 2019. <https://www.pewresearch.org/short-reads/2019/01/17/where-millennials-end-and-generation-z-begins/>.
- Emelda. "Kajian Teologis Mengenai Kepemimpinan Gereja Mula-Mula dalam Kisah Para Rasul." *Jurnal Sains Dan Seni ITS* 6, no. 1 (2017): 51–66.
- Erikson, Millard J. *Teologi Kristen Volume Tiga*. Malang: Gandum Mas, 2018.
- Francis, Tracy, and Fernanda Hoefel. "'True Gen': Generation Z and Its Implications for Companies." *McKinsey & Company*, 2018.
- Gonvernmance Matters. "The Relationship Model of Governance 101 for Christian Churches." *Gonvernmance Matters*, 2021.
<https://governancematters.com/product/the-relationship-model-of-governance-101-for-christian-churches/>.
- Grudem, Wayne. *Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine*. Michigan: Zondervan Academic, 2010.

- McKim, Donald K. *Presbyterian Questions, Presbyterian Answers: Exploring Christian Faith*. Louisville: Westminster John Knox Press, 2004.
- Siagian, Hendriko, dan Pardomuan Munthe. “Pengaruh Pengorganisasian Pucuk Pimpinan Gereja terhadap Episkopal.” *In Theos: Jurnal Pendidikan Agama Dan Teologi* 1, no. 2 (2021): 65–73.
- Sitompul, A.A. “Arti Jabatan dalam Gereja Menurut M. Luther.” dalam *Missio Dei: Kumpulan Karangan Kenang-Kenangan pada Ulang Tahun Ke-60 Dr. A. Lumbantobing*, edited by R.M.G. Marbun and A. Munthe. Pematang Siantar: Kolportase GKPI, 1980.
- Sunarto. “Perbandingan Antara Bentuk Presbiterian dan Kongregasional dalam Pemerintahan Jemaat.” *TE DEUM (Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan)* 3, no. 1 (2021): 43–62. <https://doi.org/10.51828/td.v3i1.82>.
- Zaluchu, Sonny Eli. “Strategi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif di dalam Penelitian Agama.” *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 4, no. 1 (2020): 28. <https://doi.org/10.46445/ejti.v4i1.167>.